

BAB III

IMPLEMENTASI *LOOK EAST POLICY* INDIA KE NEGARA-NEGARA ASEAN

Sebagaimana dipahami, sebuah kebijakan luar negeri sebagaimana halnya sebuah produk kebijakan dari sebuah negara, dirumuskan melalui sebuah mekanisme atau proses sesuai dengan mekanisme pada pemerintahan tersebut. Bab ini akan membahas berbagai hal implementatif yang berkenaan dengan *Look East Policy* sebagai komponen strategis dalam kebijakan luar negeri India atas negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) yang dirilis oleh pemerintah India pada tahun 1992.

A. Implementasi *Look East Policy* dan Kebijakan-kebijakan Luar Negeri India

C. Raja Mohan (2004) mengemukakan terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan India untuk merilis *Look East Policy* sebagai bagian dari komponen kebijakan luar negerinya di kawasan Asia Tenggara. Pertama, berakhirnya Perang Dingin tidak hanya membawa pengaruh besar bagi India, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi demikian sangat mendukung bagi terbentuknya pola relasi baru yang bersifat strategis, baik dalam lanskap politik maupun ekonomi. Kedua, *Look East Policy* membuka ruang dialog baru bagi India untuk merevitalisasi hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara dengan mengedepankan aspek-aspek hibriditas budaya sebagai hasil dari hubungan historis diantara keduanya. Ketiga, interdependensi dalam sektor ekonomi selalu memungkinkan bagi terbangunnya proyeksi kerjasama diantara negara-negara di dunia, termasuk diantara India dan negara-negara Asia Tenggara. Keempat, kedekatan geografis diantara kedua belah pihak menjadikan kerjasama positif sebagai pilihan yang rasional, baik bagi India maupun negara-negara Asia Tenggara.

Dinpankar Banerjee⁹⁶ memberikan gagasan bahwa kebijakan luar negeri India idealnya didasari atas tiga unsur, unsur yang pertama adalah India harus menguatkan basis regionalnya. Dimulai dengan regional yang paling dekat, lalu meningkat hingga kepada tataran Asia Pasifik. Untuk melakukan itu, India membutuhkan basis peran kepemimpinan yang kuat dan bervisi yang bias merangkul negara-negara di sekitarnya untuk bekerjasama dengan India.

Negara negara tersebut tidak lagi dianggap rival, melainkan sebagai partner untuk kemajuan yang bisa menyumbangkan kemajuan bagi dinamika kawasan. Dengan demikian, India bisa membuat penguatan pada *regional proximity power*. Disisi lain, India juga harus memperhatikan unsur ekonominya. Unsur inilah yang harusnya menjadi dasar bagi pendekatan kebijakan luar negeri India ke depan. Masalah pengangguran di India merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Pertumbuhan ekonomi India harus diatas 7 *percent* untuk menjamin stabilitas sosial. Unsur yang ketiga, India harus merubah persepsinya tentang keamanan. Tidak seperti saat perang dingin, tidak semua negara harus dianggap sebagai ancaman yang potensial. India harus mulai menjalin kerjasama dengan wilayah yang mempunyai prospek kemajuan dan peningkatan ekonomi di masa depan. ASEAN memenuhi kedua kriteria tersebut.

B. Implementasi *Look East Policy* dalam bentuk Kebijakan-kebijakan Luar Negeri India terhadap ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara

Berdasarkan paparan Sushila Narasimhan, paling tidak terdapat dua fase dalam implementasi *Look East Policy* India kepada negara-negara ASEAN. Fase pertama adalah pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan dengan fokus utama untuk merevitalisasi hubungan India dengan negara-negara Asia Tenggara setelah sempat memburuk pada masa Perang Dingin. Fase ini ditandai dengan peningkatan kerjasama kedua belah pihak dalam sektor ekonomi dan investasi, termasuk dengan meningkatnya volume perdagangan diantara India dengan negara-negara ASEAN. Setelah sempat

⁹⁶ Banerjee, Dipankar, *The End Of Cold War And Its Effect At Global, Regional, And National Level: The Indian Response*, dalam Lalith mansingh, et. al. (eds), *Indian Foreign Policy: Agenda For 21st Century*, Vol 1, New Delhi, Foreign Service Institute and Honank Publisher, PVT LTD, 1997.

mengendur pada periode pertengahan hingga akhir tahun 1990-an dikarenakan krisis finansial yang menerpa sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, fase kedua pelaksanaan *Look East Policy* kembali direalisasikan pada awal tahun 2000.⁹⁷

Fase kedua pelaksanaan *Look East Policy* dicirikan dengan lebih luasnya cakupan atau dimensi pada kebijakan tersebut. Pada fase ini *Look East Policy* India kepada negara-negara Asia Tenggara memiliki tujuan serta fokus untuk membangun relasi yang lebih mendalam dengan negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai sektor kerjasama, baik ekonomi, politik, maupun keamanan. Telah terbangunnya kedekatan institusional dengan negara-negara ASEAN pada fase pertama pelaksanaan kebijakan ini membuat India kemudian memperluas cakupan kerjasama dengan negara-negara ASEAN.⁹⁸

Pada paparan berikut akan dijelaskan implementasi serta pengaruh *Look East Policy* terhadap peningkatan peran internasional India di kawasan Asia Tenggara dalam periode pasca-Perang Dingin. Realisasi *Look East Policy* akan ditelaah berdasarkan dua bentuk kerjasama yang dilakukan India dibawah kebijakan *Look East Policy*: kerjasama kawasan/regional dan kerjasama yang bersifat bilateral.

B.1. Kerjasama Regional dan Sub-Regional

B.1.1. Kerjasama Regional India-ASEAN

Realisasi *Look East Policy* dalam peningkatan peran internasional India di kawasan Asia Tenggara membawa dampak positif bagi hubungan antara India dengan ASEAN sebagai organisasi pada tingkat kawasan. Setelah menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 1992, India kemudian menjadi mitra dialog penuh pada tahun 1995. Kemudian, India juga menjadi

⁹⁷ Sushila Narasimhan, "India's 'Look East' Policy: Past, Present and Future", dalam K. Raja Reddy (ed.), *India and ASEAN: Foreign Policy Dimensions for the Twenty-First Century*, (New Delhi, New Century, 2005), hal. 64-66.

⁹⁸ *ibid.*

anggota *ASEAN Regional Forum (ARF)* pada tahun 1996. Pada tataran yang lebih strategis, juga dihasilkan kesepakatan diantara India-ASEAN dimana disepakati pelaksanaan *India-ASEAN Summit* yang pertama pada 5 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja yang adalah merupakan langkah signifikan India dalam berperan lebih mendalam di dalam proses institusionalisasi formal negara-negara ASEAN. Hingga tahun 2007, *India-ASEAN Summit* telah diadakan sebanyak lima kali dengan hasil yang terbilang cukup signifikan bagi kedua negara.

Ada beberapa kondisi mendukung terjadinya kerjasama antara India dan ASEAN. Kondisi yang pertama adalah berakhirnya perang dingin. Selama perang dingin, hampir seluruh dunia terbagi dalam dua belah blok yang saling bertentangan. Roda perhatian dunia tertuju kepada dinamika yang terjadi antara kedua blok tersebut. Peningkatan status hubungan politik internasional ataupun kegiatan politik akan memberikan insentif yang luar biasa untuk menarik salah satu blok untuk turut campur. Yang kedua, tumbuhnya konflik-konflik yang memiliki tipe baru yang berbeda dari sebelumnya membuat India harus menyesuaikan kembali haluan politik luar negerinya. Dinamika regional memberikan pengaruh penting bagi perubahan kebijakan ini. Yang ketiga, meningkatnya interdependensi dan integrasi dunia melalui teknologi dan informasi. Dari kondisi yang terakhir ini, kemudian muncul isu-isu baru yang disebut dengan *global security*, seperti *global warming*, *food security*, *environmental security*, *trade and tariff*, and *sustainable development*.

Dalam sektor ekonomi, pada tahun 2003 enam negara ASEAN dan India telah bersepakat untuk menurunkan tarif atas 105 produk.⁹⁹ Kesepakatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan India mulai tahun 2004 sampai tahun 2007.

⁹⁹ "ASEAN-India Sepakat Turunkan Tarif 105 Produk pada Tahun 2007", *op. cit.*

Sementara itu, empat negara ASEAN yang baru, negara-negara CLMV (Kamboja-Laos-Myanmar-Vietnam) menyepakati penurunan tarif untuk 111 produk dengan India mulai tahun 2004 sampai tahun 2010.¹⁰⁰

Kesepakatan bersama itu tertuang dalam Perjanjian Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan India (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and India*) yang ditandatangani oleh para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee pada tahun 2003. Selain itu telah terbentuk pula mekanisme pertemuan *India-ASEAN Business Summit* yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002 di New Delhi dengan tujuan utama untuk menjadi forum untuk memperluas jaringan kerjasama dan komunikasi diantara para pembuat kebijakan dengan para pelaku bisnis di ASEAN dan India.

Ketertarikan negara-negara ASEAN untuk melakukan kerjasama dengan India didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, ASEAN secara tradisional terlibat dengan semua kekuatan utama dunia. Peningkatan kemampuan ekonomi dan teknologi India merupakan propek tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Kedua, ASEAN dan India bekerjasama untuk membahas kemungkinan terbentuknya kawasan perdagangan bebas, yang diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Hal ini tentunya membutuhkan adanya saling pengertian di antara kedua belah pihak.¹⁰¹

Untuk mewujudkan kerjasama ekonomi positif diantara kedua belah pihak, diadakan Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Minister Meeting -AEMM*) dan Konsultasi India pada tanggal 15 September 2002 di Brunei Darussalam, setelah membahas Laporan Studi Bersama yang

¹⁰⁰ *ibid.*

¹⁰¹ C.S. Kuppaswamy, "India's Look East Policy: More aggressive, Better Dividends", South Asia Analysis Group's Paper no. 1663 -03. 01. 2006 <http://www.saag.org/%5Cpapers17%5Cpaper1663.html>, (Diakses pada tanggal 19 November 2007 pukul 04.10 WIB).

memutuskan pembentukan Gugus Tugas Hubungan Ekonomi ASEAN-India (*ASEAN-India Economic Linkages Task Force -AIELTF*). AIELTF memiliki kewenangan untuk mempersiapkan naskah Kerangka Kesepakatan untuk memperluas wilayah serta cakupan perdagangan dan kerjasama ekonomi ASEAN-India sebelum Konsultasi AEM-India kedua.

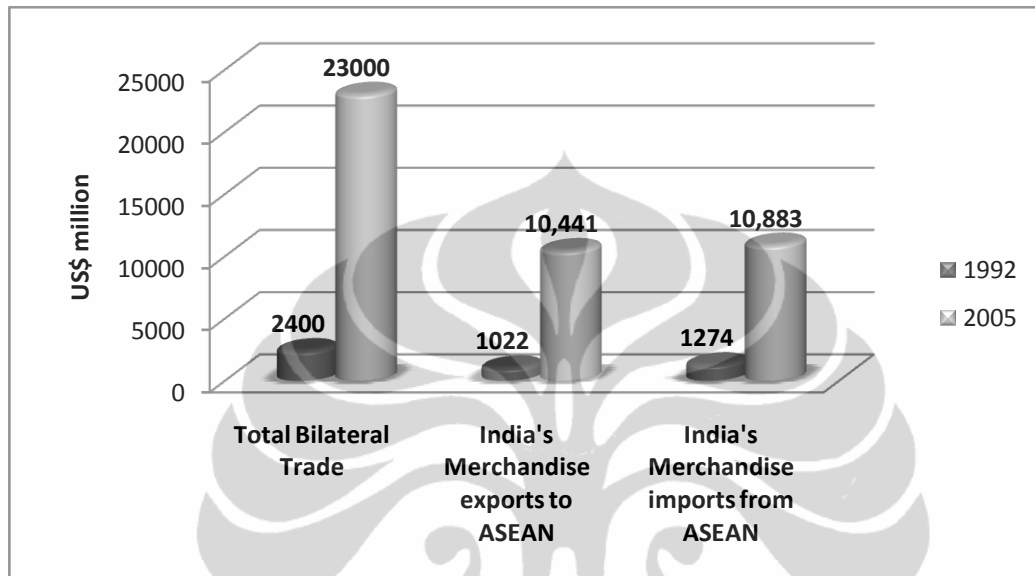
Selanjutnya, pada Pertemuan *India-ASEAN Summit* pertama tahun 2002, Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee, menyerukan bahwa India akan memberlakukan perlakuan khusus dan berbeda ke negara-negara anggota ASEAN, berdasarkan pada tingkat pembangunan masing-masing negara anggota ASEAN agar dapat dengan mudah mengakses pasar India. Selain itu, mantan pemimpin India tersebut juga mengatakan bahwa India berkomitmen untuk menyamakan tingkat puncak tarifnya pada tingkat yang sesuai dengan negara-negara Asia Timur pada tahun 2005.¹⁰²

Komitmen tersebut ditambah dengan persetujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area -FTA*) antara India-ASEAN dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang. Kedua belah pihak memilih untuk meningkatkan kedalaman level kerjasama ekonomi diantara kedua belah pihak terutama dikarenakan tren positif yang ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan yang telah berlangsung semenjak *Look East Policy* dikeluarkan oleh pemerintah India (**Lihat grafik III.1.**)

¹⁰² "PM's Address at First India-Asean Summit", <http://pmindia.nic.in/speech.asp?id=35>, (Diakses pada tanggal 19 November 2007 pukul 01.00 WIB).

Grafik III.1.

Perbandingan Perdagangan India-ASEAN Tahun 1992 dan 2005



Sumber: *Website Departemen Perdagangan Pemerintah India*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya diatas, sebagai upaya untuk merealisasikan hal tersebut, Vajpayee dan para pemimpin negara-negara ASEAN menyepakati sebuah kerangka kerja dalam bentuk Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan India yang ditandatangani pada *India-ASEAN Summit* kedua, 8 Oktober 2003, di Bali. Elemen kunci dalam kesepakatan tersebut meliputi FTA di sektor barang, jasa, dan penanaman modal, sekaligus dalam berbagai area kerjasama ekonomi lainnya. Kesepakatan tersebut juga menyediakan Program Panen Awal (*Early Harvest Programme -EHP*), yang meliputi semua isu Kerjasama Ekonomi dan adanya daftar umum barang untuk diadakannya konsesi tarif sebagai langkah kesepahaman di antara kedua pihak. Inti dari kesepakatan tersebut adalah:

(1) FTA dalam sektor barang

Penurunan tarif akan dimulai per 1 Januari 2006, sistem *Most Favoured Nations* (MFN) akan dihapuskan secara bertahap. India akan menghapus tarifnya pada tahun 2011 bagi Brunei, Kamboja, Laos, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, India dan Filipina akan menghapus tarif mereka berdasarkan sistem timbal-balik (*reciprocal*) selambatnya pada tahun 2016;

(2) FTA dalam sektor jasa dan penanaman modal

Perundingan akan dimulai pada tahun 2005 dan diakhiri pada tahun 2007. Identifikasi, liberalisasi, dan langkah-langkah lain yang diperlukan atas sektor jasa harus diakhiri dan dilaksanakan selanjutnya;

(3) Kerjasama ekonomi

Kerjasama ekonomi dalam haal ini adalah termasuk langkah-langkah untuk memberikan fasilitas perdagangan, penentuan sektor-sektor kerjasama, serta langkah-langkah untuk mempromosikan perdagangan dan penanaman modal investasi;

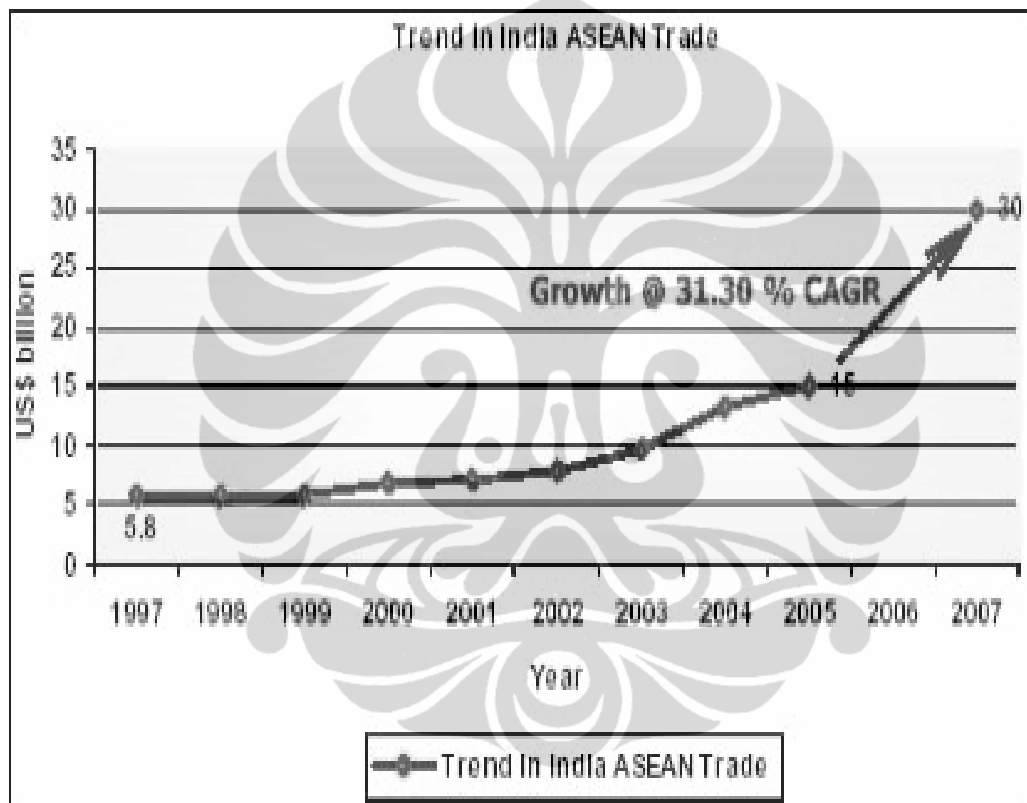
Kalangan ekonom dan pelaku perdagangan secara umum berpandangan bahwa realisasi FTA diantara kedua pihak akan memberikan kesempatan bagi India untuk memperluas peluang untuk memperkuat kerjasama dengan ASEAN di luar kerjasama pada bidang perdagangan. Pada awalnya, ASEAN memang terkesan lambat dalam menanggapi tawaran India, tetapi hal tersebut berubah seiring dengan mulai membaiknya perekonomian negara-negara ASEAN pasca krisis finansial tahun 1997.

Selain itu, negara-negara ASEAN juga menyadari pentingnya posisi India sebagai pengimbang bagi kekuatan RRC di Asia.¹⁰³ Terlebih, kerjasama ekonomi antara India dan negara-negara ASEAN juga menunjukkan tren positif semenjak mulai diinisiasi pasca dikeluarkannya *Look East Policy* pada tahun

¹⁰³ C.S. Kuppaswamy, "India's Look East Policy: More aggressive, Better Dividends", *op. cit.*

1992 sebagaimana tampak pada data dalam **grafik III.1.** diatas dan **grafik III.2.** berikut ini.

Grafik III.2.
Pertumbuhan Perdagangan India-ASEAN 1997-2005 dan
Ekspektasi Pencapaian pada Tahun 2007



Sumber: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

Dalam hal penanaman investasi langsung (Foreign Direct Investment-FDI), situasi menunjukkan perkembangan dari 1980an menuju 1990an. Krisis Asia mendeklinasi keadaan tersebut. Namun, Filipina dianggap sebagai negara yang memiliki dampak yang paling minim dalam krisis tersebut. Disisi lain,

Indonesia merupakan negara yang memiliki FDI minus semenjak 1997 hingga 2002.

Tabel.III.1.

Foreign Direct Investment Inflows: ASEAN and India In a Global Context (1980-2002)
(values in \$ million)

	1980-84	1985-89	1990-94	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
World	49630	141169	194860	331068	386140	481911	686028	1079083	1392957	823825	651118
Developed Countries	37105	116352	132916	219688	219908	269654	472265	824642	1120528	589379	460334
Developing Countries	12525	28417	61943	111380	166232	212257	213763	254441	272429	234446	190784
Developing Asia	5284	12076	38689	76565	88628	99700	90037	105266	138628	97418	88351
South Asia	178	339	838	2937	3590	4904	3480	3079	3079	3949	4559
India	54	156	414	2151	2525	3619	2633	2168	2319	3403	3449
ASEAN	3063	4794	15227	28231	30209	34099	22406	25029	18625	15211	13957
Brunei	-3	-1	6	583	654	702	573	748	549	526	1035
Cambodia	0	0	31	151	294	168	243	230	149	148	54
Indonesia	210	442	192	4346	6194	4678	-356	-2745	-4550	-3279	-1523
Laos	0	1	22	88	128	86	45	52	34	24	25
Malaysia	1131	799	4423	5815	7297	6323	2714	3895	3788	554	3203
Myanmar	0	1	160	318	581	879	684	304	208	192	129
Philippines	39	389	942	1577	1618	1261	1718	1725	1345	982	1111
Singapore	1387	2427	5181	11503	9303	13533	7594	13245	12461	10949	7655
Thailand	287	732	1990	2070	2338	3882	7491	6091	3350	3813	1068
Viet Nam	11	3	780	1780	1803	2587	1700	1484	1289	1300	1200

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Selain dalam sektor ekonomi, hubungan kerjasama India-ASEAN juga berlangsung dalam sektor kerjasama politik serta keamanan. Keduanya telah menyepakati beberapa dokumen kerjasama sebagai berikut.

- (a) *ASEAN-India Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* (2003);

- (b) Kesepakatan India untuk meratifikasi *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 2003;
- (c) *ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity* (2004); dan
- (d) *Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity*.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hubungan antara India dengan negara-negara ASEAN juga sempat merenggang dikarenakan persepsi negatif negara-negara ASEAN atas proyek pengembangan kapabilitas militer India. Tindakan India untuk meratifikasi TAC pada tahun 2003 adalah salah satu momentum yang semakin mendekatkan India dengan negara-negara ASEAN.

Dengan ratifikasinya atas TAC, berarti India telah menyepakati untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kerjasama dalam melakukan peran internasionalnya di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut penting, terutama juga mengingat posisi India sebagai salah satu negara nuklir dunia.

Disisi lain, Perkembangan teknologi juga menjadi *Gravity* baru dalam hubungan India dan ASEAN. Di era modern, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan telah menempatkan informasi dan teknologi dalam tataran yang tidak bisa terpisahkan. Perkembangan teknologi ini yang dilansir akan menjadi *buffer power*/kekuatan penyangga bagi pertumbuhan ekonomi modern.

Tabel III.2.

Indikator-indikator Infrastruktur dan Penggunaan ICT di Negara-negara ASEAN (2001)

ASEAN Member Countries	Telephone Mainline				Mobile Phone Per 1000 People	Personal Computer Per 1000 People	Internet Users (000)	Information and Expenditure Communication	
	Per 1000 People	In Largest city per 1000 People	Waiting time year (200)	Cost of local call per 3 minute (US \$)				% of GDP	Per capita US \$
ASEAN-6									
Brunei									
Indonesia	35	261		0.02	31	11	4000	2.2	17
Malaysia	196		0.7	0.02	314	126.1	6500	6.6	262
Philippines	42	265		0	150	21.7	2000	42	41
Singapore	471	471	0	0.02	724	508.3	1500	9.9	2110
Thailand	99	452	1.6	0.07	123	27.8	3536	3.7	76
New ASEAN Members									
Cambodia	2	19		0.03	17	1.5	10	-	-
Lao PDR	10	65	1.1	0.02	5	3	10		
Myanmar	6	32	5.3	0.01	0	1.1	10	-	-
Vietnam	38	-	-	0.02	15	11.7	1010	6.7	26
Low Income	30	130	1.4	0.05	10	6.1	15932	-	-
Low Middle Income	93	270	2	0.04	72	21.6	112591	-	-
High Income	593	-	0	0.08	609	416.3	388888	-	-

Sumber: The World Bank (2003) *World Development Indicators*, The World Bank, Washington DC,.

Informasi dan teknologi mendapatkan banyak tempat aplikatif dalam hubungan ASEAN dan India, misalnya dalam dinamika *Software* dan *Hardware*, *Business development*, *BioTechnologies*, *Economic Development*, *Human resources Development*. Bidang-bidang ini yang kemudian menjadi titik tumpu bagi kinerja pemerintahan di ASEAN

Tabel. III.3.

Jumlah perusahaan software di Negara-negara ASEAN

Negara	1998	2002
Singapura	35	48
Malaysia	6	13
Indonesia	1	4
Thailand	2	5
Filipina	1	1
Vietnam	0	2
Total	45	73

Sumber: NASSCOM (2002)

Ekspor Software India kenegara-negara ASEAN juga mengalami peningkatan sejak 1999. Dari 1999-2003, peningkatan signifikan hampir terjadi pada seluruh negara ASEAN kecuali Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar.

Tabel III.4.

Ekspor Software dari ke negara-negara ASEAN

(US \$ Million)

Negara	1999- 2000	Share (%)	2000- 2001	Share (%)	2001- 2002	Share (%)	2002- 2003	Share (%)	ACG (%)
Indonesia	3.54	4.51	1.13	0.45	12.12	5.55	14.23	5.21	59.00
Malaysia	16.96	21.60	25.03	9.88	32.37	14.75	26.88	9.84	16.59
Filipina	1.89	2.41	2.95	1.16	4.40	2.05	7.92	2.90	61.22
Singapura	54.81	69.81	218.41	86.18	159.31	72.61	209.29	76.59	56.30
Thailand	0.71	0.90	5.96	2.35	10.92	4.98	14.61	5.35	174
Brunei	0.5	0.64	0	0	0.01	0.00	0	0.00	
Vietnam	0.02	0.03	0	0	0.13	0.06	0.34	0.12	
Laos	0.07	0.09	0	0	0	0	0	0	
Myanmar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamboja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	78.51	100	253.49	100.0237	219.4	100	273.27	100	

Sumber: Electronic and Computer Software Export Promotion Council (2002)

Disisi lain, Impor India dalam bidang IT juga mengalami peningkatan sejak 1991 hingga 2003. Impor India sejak 1991 tidak pernah sekalipun mengalami penurunan, bahkan pada era millennium baru, peningkatan impornya sangat signifikan.

Tabel III.5.

Impor IT India dari ASEAN

(US \$ Million)

Year	Singapura	Malaysia	Indonesia	Thailand	Filipina	Vietnam	Total
1991	50.34 (96.01)	0.73 (1.39)	0.01 (0.02)	1.29 (2.46)	0.06 (0.11)	0.00	52.43 (4.31)
1992	44.52 (89.36)	1.22 (2.45)	0.05 (0.10)	3.98 (7.99)	0.05 (0.10)	0.00	49.82 (5.54)
1993	50.24 (89.62)	2.68 (4.78)	0.08 (0.14)	2.90 (5.17)	0.16 (0.29)	0.00	56.06 (5.88)
1994	68.60 (78.26)	16.82 (19.19)	0.05 (0.06)	1.87 (2.13)	0.32 (0.37)	0.00	87.66 (8.78)
1995	118.89 (81.35)	19.44 (14.13)	0.56 (0.41)	5.09 (3.70)	0.56 (0.41)	0.00	137.54 (7.36)
1996	125.79 (71.87)	38.15 (21.80)	1.59 (0.91)	8.23 (4.70)	1.26 (0.72)	0.00	175.02 (6.77)
1997	135.12 (67.23)	55.87 (27.80)	2.71 (1.35)	5.84 (2.91)	1.44 (0.72)	0.00	200.98 (7.14)
1998	240.17 (74.14)	67.93 (20.97)	6.50 (2.01)	5.90 (1.82)	3.40 (1.05)	0.03 (0.01)	323.93 (9.44)
1999	281.95 (73.86)	69.82 (18.29)	10.95 (2.87)	14.90 (3.90)	3.99 (1.05)	0.12 (0.03)	381.75 (9.78)
2000	355.88 (62.11)	143.64 (25.07)	20.58 (3.59)	36.73 (6.41)	15.31 (2.67)	0.86 (0.15)	573.01 (12.65)
2001	445.89 (53.53)	238.58 (28.64)	23.96 (2.88)	97.26 (11.68)	26.12 (3.14)	1.11 (0.13)	833.01 (20.05)
2002	332.26 (48.20)	196.30 (28.48)	12.56 (1.82)	128.91 (18.70)	18.81 (2.73)	0.49 (0.07)	689.33 (15.66)
2003	440.39 (56.58)	236.88 (30.43)	11.99 (1.54)	41.74 (5.36)	47.17 (6.06)	0.09 (0.01)	778.38 (15.07)

Sumber: Center for Monitoring Indian Economy (2003)

India juga mengembangkan prospek ekspor dengan ASEAN dalam bidang elektronik. Ekspor terbesar elektronik India ke ASEAN terjadi pada 2002 dengan besaran 212.97(6.14).

Tabel III.6.

Ekspor Elektronik India ke ASEAN

(US \$ Million)

Year	Singapura	Malaysia	Indonesia	Thailand	Filipina	Vietnam	Total
1991	26.95 (98.9)	0.17 (0.62)	0.00	0.08 (0.29)	0.00	0.04 (0.15)	27.24 (3.15)
1992	11.82 (84.9)	1.70 (12.08)	0.16 (1.14)	0.33 (2.35)	0.00	0.06 (0.43)	14.07 (1.38)
1993	27.88 (30.0)	0.66 (2.14)	0.28 (0.91)	0.83 (2.69)	0.55 (1.78)	0.69 (2.23)	30.89 (2.64)
1994	47.25 (95.5)	0.70 (1.42)	0.17 (0.34)	1.16 (2.35)	0.09 (0.18)	0.09 (0.18)	49.46 (3.18)
1995	71.27 (88.4)	7.51 (9.32)	0.09 (0.11)	1.34 (1.66)	0.12 (0.15)	0.29 (0.36)	80.62 (4.19)
1996	79.26 (65.3)	37.90 (31.24)	0.95 (0.78)	2.37 (1.95)	0.45 (0.37)	0.37 (0.30)	121.32 (4.45)
1997	48.26 (46.2)	54.31 (51.96)	0.24 (0.23)	0.81 (0.77)	0.80 (0.77)	0.08 (0.08)	104.52 (3.60)
1998	31.96 (43.41)	39.34 (52.08)	0.40 (0.54)	0.84 (1.14)	2.04 (2.77)	0.02 (0.03)	73.62 (2.98)
1999	16.45 (65.51)	7.74 (30.82)	0.22 (0.88)	0.39 (1.55)	0.15 (0.60)	0.12 (0.48)	25.11 (1.55)
2000	21.43 (27.48)	53.93 (96.15)	0.20 (0.26)	0.57 (0.73)	1.73 (2.22)	0.11 (0.14)	77.99 (3.49)
2001	29.08 (17.76)	131.49 (80.58)	0.24 (0.15)	1.70 (1.04)	0.50 (0.31)	0.20 (0.12)	163.74 (5.61)
2002	37.97 (17.83)	170.31 (79.97)	0.45 (0.21)	2.55 (1.20)	0.94 (0.44)	0.18 (0.08)	212.97 (6.14)
2003	39.93 (51.20)	17.05 (22.42)	0.31 (0.41)	16.43 (1.61)	1.22 (1.60)	0.98 (1.29)	76.04 (1.64)

Sumber: Center for Monitoring Indian Economy (2003)

B.1.2. Mekong-Ganga Cooperation Initiative

Sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan realisasi *Look East Policy* di kawasan Asia Tenggara, India kemudian menginisiasi pembentukan forum kerjasama *Mekong-Ganga Cooperation Initiative* (MGCI) pada 10 November tahun 2000 di Vientiane, Laos, melalui momentum *First MGC Ministerial Meeting*. MGCI sejatinya adalah upaya India untuk merangkul

negara-negara *ASEAN's CLMV* (Kamboja-Laos-Myanmar-Vietnam) ditambah Thailand dengan tujuan untuk membangun relasi/kerjasama pada level yang lebih mendalam, sesuai dengan perkataan Perdana Menteri Vajpayee untuk memberi 'perlakuan khusus' dalam hubungan kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian pada masing-masing negara ASEAN yang tidak sama tingkat pertumbuhan ekonominya.

MGCI merumuskan cakupan kerjasamanya dalam empat sektor utama, yaitu turisme, kebudayaan, pendidikan, dan transportasi-komunikasi dalam hubungannya untuk menunjang pencapaian target untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi diantara negara-negara MGCI. Sebagaimana dikemukakan oleh Swaran Singh, MGCI adalah merupakan upaya India untuk membangun kemitraan strategis dengan negara-negara yang kerap disebut sebagai negara-negara *Greater Mekong Sub-region* (GMS), yaitu negara-negara yang dilintasi oleh sungai Mekong. Negara-negara GMS mulai mendapatkan perhatian masyarakat internasional setelah pada tahun 1992 *Asian Development Bank* (ADB) merilis *Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation Program* (GMS-ECP) sebagai upaya ADB untuk meningkatkan intensitas kerjasama diantara negara-negara GMS sekaligus mengundang kehadiran 'pihak luar' untuk membantu negara-negara GMS mencapai target pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut.¹⁰⁴ Perkembangan besar terjadi di kawasan ini setelah empat negara GMS, negara-negara CLMV, kemudian bergabung dengan ASEAN pada medio akhir tahun 1990-an sebagai bagian dari program *ASEAN Integration Initiative* yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh kawasan Asia Tenggara -termasuk Indochina dibawah naungan ASEAN.

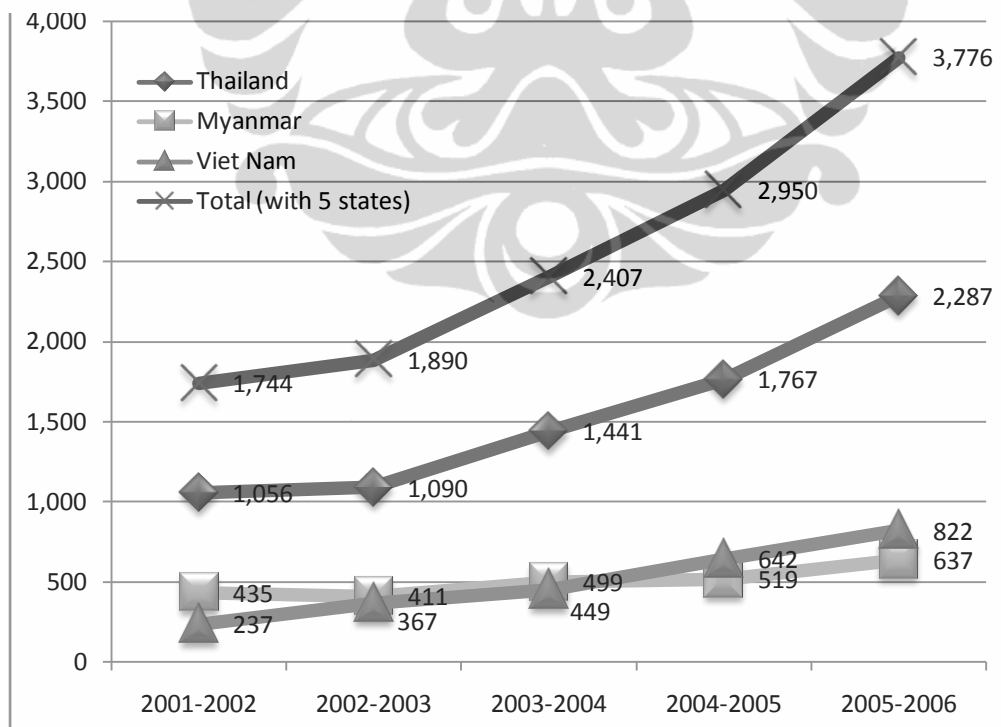
Kehadiran India dalam kerjasama dengan negara-negara GMS diawali dengan pembentukan *Mekong-Ganga Swarnabhoomi Programme* sebelum

¹⁰⁴ Swaran Singh, "Mekong-Ganga Cooperation Initiative: Analysis and Assessment of India's Engagement with Greater Mekong Sub-region", The Irasec Occasional Paper no. 3, 2007 (Bangkok: Irasec, 2007).

kemudian berubah menjadi MGCI. Keputusan untuk membentuk kerjasama ini diputuskan didalam pertemuan enam Menteri Luar Negeri dari lima negara GMS dan India pada pertemuan *ASEAN Post-Ministerial Conference* ke-33 di Bangkok pada bulan Juli tahun 2000.¹⁰⁵ Status negara-negara CLMV sebagai anggota baru ASEAN adalah merupakan kondisi yang sangat strategis bagi India. Selain faktor kedekatan historis dan kesamaan budaya sebagai hasil diaspora kebudayaan India di kebanyakan negara-negara tersebut, keberadaan mereka memiliki nilai penting lainnya bagi India dalam hubungannya dengan maksimalisasi atas Look East Policy India terhadap negara-negara Asia Tenggara. Semenjak dibentuk pada tahun 2000, kerjasama perdagangan India dengan negara-negara GMS mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada **grafik III.3.** berikut.

Grafik III.3.

Volume Perdagangan India-MGCI (Dalam Juta U\$)



¹⁰⁵ *ibid.*

Sumber: Website Departemen Perdagangan Pemerintah India

Selain dalam sektor ekonomi dan kebudayaan, inisiatif India dalam kerjasama MGCI juga berlangsung di dalam bidang pengembangan sumber daya manusia di negara-negara CLMV. Kondisi bahwa sumber daya manusia pada negara-negara tersebut masih terhitung tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya membuat India kemudian merilis inisiatif tersebut. India mengadakan berbagai kursus dan pelatihan, seperti misalnya pelatihan dalam pembangunan infrastruktur jalan kereta api dan sistem transportasi kereta api kepada personel dari tiap-tiap negara CLMV dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan sistem transportasi yang akan meningkatkan mobilitas dan kerjasama inter-MGCI.¹⁰⁶ Selain itu, India juga mengadakan kursus pelatihan bahasa dan kewiraswastaan dengan pembentukan *English Language Training (ELT) Centre* dan *Enterpreneurship Education Centres (EDC's)* pada tiap-tiap ibukota negara-negara CLMV.

Untuk meningkatkan kerjasama anantara negara-negara MGC, pertemuan tingkat menteri ke 2 diadakan di Hanoi, dan menghasilkan agenda yang disebut sebagai *Hanoi Action Plan*. *Hanoi Action Plan* ini membangun mekanisme mekanisme sebagai berikut: 1) Annual Ministerial Meeting yang mengikuti ASEAN Foreign Ministers Annual Meeting; 2) Senior Official Meeting; 3) pembentukan 5 kelompok kerja untuk mempromosikan bidang bidang Tourisme, Kebudayaan, Human Resource Development dan Transportasi. Kelompok kerja (Working Group) tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Working group on tourism promotes overland tourism linking more than one member country. This Group exchanges tourism information and statistic on Buddhist pilgrims.
- Working group on culture develops schemes focused on cultural preservations. This group promotes exchanges of scholars, writers, performers and researchers.

¹⁰⁶ *ibid.*

- Working group on human resource development covers exchange of information technology instructors and lecturers and training programme for English instructors. This includes research among education institutes and distance education.
- Working group in transportation focuses on matter relating to the development of land, sea, and air transportation linkages. This group promotes international telecommunication among all member countries.
- Working group on plan of action reviews the developmental activities of the four working groups¹⁰⁷.

B.1.3. BIMSTEC (*Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation*)

Salah satu pilar penting lainnya dalam pelaksanaan *Look East Policy* terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah inisiatif India di dalam pembentukan BIMSTEC (*Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation*) yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Tengah, yaitu Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, dan Nepal.

Organisasi kerjasama ini BIMSTEC dibentuk pada 6 Juni 1997, dengan nama semula BIST-EC (*Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation*) dan kemudian berubah menjadi BIMST-EC (*Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation*) pada bulan Desember 1997 saat Myanmar bergabung menjadi anggota penuh. Dengan bergabungnya Nepal dan Bhutan pada tahun 2003, organisasi ini kembali mengganti namanya menjadi BIMSTEC pada Pertemuan Puncak pertama di Bangkok pada bulan Juli tahun 2004.

Pertemuan lanjutan kemudian diadakan di Dhaka pada 1999 dan menghasilkan sebuah Concept Paper yang menggarisbawahi fungsi-fungsi tertentu. *Feature* utamanya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷ <http://mfa.go.th/web/882.dhp>.

1. Providing strategic leadership in initiating economic activities to benefit the group as a whole;
2. Facilitating implementation of development projects undertaken by the group;
3. Developing mechanism for greater private sector BIMSTEC activities;
4. Enhancing the quality of information flows besides promoting institutional linkages and networking; and
5. Generating increased participation by the business community in the identified sectors of BIMSTEC.

Tabel III.7.
Sektor Kerjasama dalam BIMSTEC

Sector	Lead /Chair Countries
<u>Trade & Investment/Sub-sector</u>	Bangladesh
<u>Technology/Sub-sector</u>	Sri Lanka
<u>Energy/Sub-sector</u>	Myanmar
<u>Transportation & Communication/Sub-sector</u>	India
<u>Tourism/Sub-sector</u>	India
<u>Fisheries/Sub-sector</u>	Thailand
<u>Agriculture/Sub-sector</u>	Myanmar
<u>Cultural Cooperation/Sub-sector</u>	Bhutan
<u>Environment and Disaster Management/Sub-sector</u>	India
<u>Public Health/Sub-sector</u>	Thailand
<u>People-to-People Contact/Sub-sector</u>	Thailand
<u>Poverty Alleviation/Sub-sector</u>	Nepal
<u>Counter-Terrorism and Transnational Crime/Sub-sector</u>	India

Sumber: Website BIMSTEC¹⁰⁸

Sebagaimana termuat dalam **tabel III.7.** diatas, cakupan kerjasama dalam BIMSTEC terdiri atas 13 sektor/sub-sektor kerjasama. BIMSTEC dikatakan sebagai sebuah forum kerjasama sub-kawasan yang memiliki nilai

¹⁰⁸ "BIMSTEC Sectors/Sub-Sectors of Cooperations", <http://www.bimstec.org/sector.html>, (Diakses pada tanggal 19 November 2007 pukul 01.00 WIB).

strategis dikarenakan BIMSTEC menaungi total populasi sekitar 1,3 milyar manusia dan memiliki intensitas perdagangan intra-kawasan yang termasuk tinggi. Sekalipun memiliki cakupan sektor kerjasama yang terbilang luas, fokus utama dari forum kerjasama sub-kawasan ini adalah pengembangan kerjasama ekonomi melalui pembentukan FTA. Negara-negara BIMSTEC mendeklarasikan *BIMSTEC Free Trade Area Framework Agreement* (BIMSTEC-FTA) pada bulan Februari tahun 2004 di Thailand. Kerangka kerjasama tersebut memuat aturan kerjasama FTA dalam mekanisme perdagangan barang, jasa, dan investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dibentuk sebuah badan untuk memantau proses liberalisasi intra-BIMSTEC yaitu *Trade Negotiating Committee* (TNC). BIMSTEC-FTA akan direalisasikan secara penuh pada tahun 2017 dengan terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan FTA oleh India, Thailand, dan Sri Lanka pada tahun 2012. Intensitas aktivitas ekonomi intra-BIMSTEC sebagai prakondisi bagi dibentuknya FTA dapat dilihat pada **tabel III.8.** dan **tabel III.9.** berikut ini.

Tabel III.8.

Intra-regional Exports between BIMSTEC Countries (US \$)

A. 1993						
Export by => From	Bangladesh	India	Myanmar	Sri Lanka	Thailand	Total-5
World	2277	20989	864	2859	37158	64147
Bangladesh <i>Percentage</i>		430 2.05	6 0.69	7 0.24	72 0.19	515 0.80
India <i>Percentage</i>	13 0.57		106 12.27	20 0.70	74 0.20	213 0.33
Myanmar <i>Percentage</i>	13 0.57	14 0.07		0.00	0.00	27 0.04
Sri Lanka <i>Percentage</i>	9 0.40	247 1.18	6 0.69		88 0.24	350 0.55
Thailand <i>Percentage</i>	15 0.66	318 1.52	0.00	22 0.77		355 0.55
Total -5 <i>Percentage</i>	50 2.20	1009 4.81	118 13.66	49 1.71	234 0.36	1460 2.28
B. 1999						
Export by => From	Bangladesh	India	Myanmar	Sri Lanka	Thailand	Total-5
World	4520	39219	1360	4264	61797	111160
Bangladesh <i>Percentage</i>		931 2.37	13 0.96	7 0.16	181 0.29	1132 1.02
India <i>Percentage</i>	50 1.11		227 16.69	49 1.15	447 0.72	773 0.70
Myanmar <i>Percentage</i>	1 0.02	53 0.14		7 0.16	0.00	61 0.05
Sri Lanka <i>Percentage</i>	7 0.15	564 1.44	7 0.51		157 0.25	375 0.66
Thailand <i>Percentage</i>	19 0.42	468 1.19	0.00	57 1.34		544 0.49
Total -5 <i>Percentage</i>	77.00 1.70	2016.00 5.14	247.00 18.16	120.00 2.81	785.00 1.27	3245.00 2.92

Sumber: *Direction of Trade Statistics Yearbook, IMF*¹⁰⁹

¹⁰⁹ "IMF's Direction of Trade Statistics Yearbook", <http://www.imf.org/external/country/IND/index.htm>, (Diakses pada tanggal 18 November 2007 pukul 02.10 WIB).

Tabel III.9.
Intra-regional Imports between BIMSTEC Countries (US \$)

A. 1993						
Import by => From	Bangladesh	India	Myanmar	Sri Lanka	Thailand	Total-5
World	4015	21269	1279	4005	46065	76633
Bangladesh <i>Percentage</i>		13 <i>0.06</i>	14 <i>1.09</i>	7 <i>0.17</i>	21 <i>0.05</i>	55 <i>0.07</i>
India <i>Percentage</i>	380 <i>9.46</i>		16 <i>1.25</i>	343 <i>8.56</i>	74 <i>0.16</i>	813 <i>1.06</i>
Myanmar <i>Percentage</i>	7 <i>0.17</i>	117 <i>0.55</i>		7 <i>0.17</i>		131 <i>0.17</i>
Sri Lanka <i>Percentage</i>	7 <i>0.17</i>	17 <i>0.08</i>	0.00		88 <i>0.19</i>	112 <i>0.15</i>
Thailand <i>Percentage</i>	43 <i>1.07</i>	54 <i>0.25</i>	0.00	109 <i>2.72</i>		206 <i>0.27</i>
Total -5 <i>Percentage</i>	437 <i>10.88</i>	201 <i>0.95</i>	30 <i>2.35</i>	466 <i>11.64</i>	183 <i>0.40</i>	1317 <i>1.72</i>
B. 1999						
Import by => From	Bangladesh	India	Myanmar	Sri Lanka	Thailand	Total-5
World	8352	44873	2210	6612	53207	115254
Bangladesh <i>Percentage</i>		54 <i>0.12</i>	1 <i>0.05</i>	7 <i>0.11</i>	40 <i>0.08</i>	102 <i>0.09</i>
India <i>Percentage</i>	1024 <i>12.26</i>		58 <i>2.62</i>	666 <i>10.07</i>	515 <i>0.97</i>	2263 <i>1.96</i>
Myanmar <i>Percentage</i>	14 <i>0.17</i>	250 <i>0.56</i>		7 <i>0.11</i>		271 <i>0.24</i>
Sri Lanka <i>Percentage</i>	7 <i>0.08</i>	47 <i>0.10</i>	0.00		63 <i>0.12</i>	117 <i>0.10</i>
Thailand <i>Percentage</i>	141 <i>1.69</i>	492 <i>1.10</i>	0.00	172 <i>2.60</i>		805 <i>0.70</i>
Total -5 <i>Percentage</i>	1186.00 <i>14.20</i>	843.00 <i>1.88</i>	59.00 <i>2.67</i>	852.00 <i>12.89</i>	618.00 <i>1.16</i>	3558.00 <i>3.09</i>

Sumber: *Direction of Trade Statistics Yearbook, IMF*¹¹⁰

Bagi India, mekanisme kerjasama yang terbangun melalui BIMSTEC adalah merupakan 'pintu masuk' untuk menjalin kerjasama lebih erat dengan Myanmar serta Thailand sebagai bagian dari *Look East Policy*. Berdasarkan pada kedekatan geografis dan juga historis, India memang memiliki hubungan yang erat dengan kedua negara tersebut. Melalui BIMSTEC India bermaksud untuk meningkatkan level hubungan dengan Myanmar dan Thailand dan mengintegrasikannya dengan kerjasama ekonomi Asia Selatan.

¹¹⁰ *ibid.*

B.1.4. CSCAP (*Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific*)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, India pada tahun 1996 telah menjadi anggota penuh (*full member*) dari ARF. Untuk mendukung peranan India di dalam mekanisme dialog keamanan intra-ARF, India melibatkan diri di dalam kerjasama CSCAP (*Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific*), yaitu mekanisme kerjasama *Track II* untuk membicarakan masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik. India menjadi associate member CSCAP pada tahun 1994 dan kemudian menjadi anggota penuh pada tahun 2000. Secara umum, keberadaan CSCAP dimaksudkan sebagai pendukung bagi mekanisme dialog yang berlangsung di dalam ARF dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan keamanan maupun politik sekaligus sebagai forum komunikasi diantara negara-negara anggota ARF. Dengan statusnya sebagai mekanisme kerjasama *Track II*, CSCAP beranggotakan kelompok non-pemerintah yang dapat terdiri dari anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok akademisi, para pelaku ekonomi, serta media massa.

Perkembangan pada isu-isu keamanan internasional dengan semakin beragamnya karakter ancaman menjadi sebuah masalah bagi pemenuhan keamanan nasional negara-negara di dunia, termasuk India. Masalah-masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme membutuhkan penanganan berbeda dengan masalah keamanan konvensional. Keterlibatan India di dalam CSCAP adalah disebabkan kebutuhan India untuk membangun *dialog networking* dengan kelompok non-pemerintah dari negara-negara yang tergabung di dalam ARF.¹¹¹ Selain itu, mekanisme dialog 'non-formal' yang terbangun di dalam CSCAP adalah merupakan wahana untuk menumbuhkan

¹¹¹ G.V.C. Naidu, "Looking East: India and Southeast Asia", *op. cit.*

rasa saling memahami diantara negara-negara Asia Pasifik. Oleh karena itu, dalam kerangka *Look East Policy*, India tidak bisa tidak melibatkan diri di dalam mekanisme CSCAP sebagaimana halnya di dalam ARF untuk menunjukkan eksistensinya di dalam pembahasan masalah-masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik.

B.2. Kerjasama Bilateral

Look East Policy India terhadap negara-negara Asia Tenggara selain termanifestasi dalam bentuk kerjasama pada level organisasi regional maupun sub-regional sebagaimana telah dipaparkan diatas, juga berjalan dalam mekanisme kerjasama bilateral. Berikut akan dipaparkan bentuk kerjasama bilateral India dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan dalam realisasi *Look East Policy*.

B.2.1. India - Thailand

India dengan Thailand menandatangani perjanjian pembentukan FTA (*Indo-Thai FTA*) dalam skala bilateral pada bulan Oktober tahun 2003. Perjanjian FTA dengan Thailand tersebut adalah merupakan perjanjian FTA bilateral pertama yang ditandatangani India dengan negara anggota ASEAN.¹¹² Berdasarkan pada perjanjian ini, liberalisasi perdagangan pada sektor jasa diantara kedua negara akan dilaksanakan pada tahun 2006 dan pada sektor komoditi atau produk akan dilaksanakan pada tahun 2010.

Selain dalam bidang ekonomi, dengan Thailand India juga telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerjasama pariwisata, pertanian, dan bioteknologi pada bulan Oktober tahun 2003 bersamaan dengan kesepakatan tentang *Indo-Thai FTA*. Dalam bidang keamanan, kedua negara juga telah membentuk *Joint Working Group* untuk

¹¹² Ashok B. Sharma, "India, Thailand may set an example of successful FTA", http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=725, (Diakses pada tanggal 18 November 2007 pukul 20.10 WIB).

saling berbagi informasi intelijen, khususnya dalam mengatasi masalah terorisme internasional.¹¹³

Berikut adalah daftar *Agreement* antara India dengan Thailand sejak berada dalam kerangka Look East Policy:

1. Agreement on Science & Technology(2001)
2. MoU on Agriculture (2001)
3. Agreement on Cooperation in the Exploration and use of Outer Space for Peaceful Purposes (2001)
4. Agreement for cooperation in the Tourism Sector(2002)
5. Framework Agreement for Establishing a Free Trade Area(2003)
6. Agreement for Exemption of Visas for holders of Diplomatic and Official Passports (2003)
7. MoU on Cooperation in the field of Agricultural Science, Technology and Economy (2003)
8. Agreement on Tourism Cooperation (2003)
9. Programme of Cooperation in Biotechnology (2003)\

B.2.2. India - Malaysia

India adalah merupakan mitra kerjasama ekonomi terbesar Malaysia di kawasan Asia Selatan dengan tingkat perdagangan bilateral mencapai 4,29 milyar US \$ pada tahun 2004.¹¹⁴ Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) India seperti BHEL dan IRCON, masing-masing adalah BUMN yang bergerak pada industri kelistrikan dan pembangunan rel kereta api, mendapatkan pekerjaan dan telah menyelesaikan banyak proyek pembangunan infrastruktur di Malaysia. Nilai strategis hubungan ekonomi India-Malaysia juga tampak dari jumlah perusahaan gabungan (*joint ventures*) antara pemerintah India dan pemerintah Malaysia yang jumlahnya mencapai 57 perusahaan pada tahun 2004. Kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak

¹¹³ "India, Thailand Conduct Joint Military, Counter Terror Exercise in Jharkhand", <http://www.india-defence.com/reports-3533>, (Diakses pada tanggal 18 November 2007 pukul 20.17 WIB).

¹¹⁴ G.V.C. Naidu, "Looking East: India and Southeast Asia", *op. cit.*

pada sektor pengolahan minyak kelapa sawit, energi, infrastruktur, dan teknologi informasi.¹¹⁵

Pada bulan Desember tahun 2004, India dan Malaysia menyepakati inisiatif pembentukan CECA (*Comprehensive Economic Cooperation Agreement*) untuk meningkatkan level kerjasama ekonomi kedua negara. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, India adalah merupakan salah satu negara yang paling awal mengembangkan kerjasama pertahanan dengan India pada tahap awal pelaksanaan *Look East Policy*. India adalah salah satu penyuplai utama kekuatan militer Malaysia seperti dalam pengadaan pesawat tempur bagi RMAF (*Royal Malaysian Air Force*) dan Kapal Patroli bagi RMN (*Royal Malaysian Navy*).¹¹⁶

Dalam bidang informasi dan teknologi, India dan Malaysia memutuskan untuk memperdalam kerjasama lapangan dan perusahaan India telah diundang untuk berinvestasi di Malaysia. Bersama Singapura, Malaysia membangun jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan serat *optic* antara Malaysia, Singapura dan India.

Berikut adalah daftar *Agreement* antara India dengan Malaysia sejak berada dalam kerangka *Look East Policy*:

1. Cooperation in Science and Technology(1998)
2. Trade Agreement (2000)
3. Exemption of the Visa requirement for holders of Diplomatic and Official Passports (2001)
4. Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income(2001)
5. Agreements in cooperation on Information Technology between NASSCOM (India) and PIKOM (Malaysia) (2004)

¹¹⁵ *ibid.*

¹¹⁶ Zhao Gancheng, "India: Look East Policy and Role in Asian Security Architecture", Paper, Presented at the Shanghai Institute for International Studies (SIIS)-Brookings Institution Conference on Regionalism in Asia, Shanghai, 11-12 Desember, 2006.

MOU INDIA-MALAYSIA

1. Defense Cooperation (1993)
2. Air Service Operation (2000)
3. Mutual Cooperation Relating to Investment, Construction, Privatization and Management of Seaports in India(2001)
4. Cooperation on Information Technology and Services(2001)
5. Cooperation in the field of Civil Service, Personnel Management and Public Administration(2001)
6. Between Securities Commission of Malaysia and the Securities and Exchange Board of India in relation to Assistance and Mutual Cooperation(2001)
7. On Space Technology between Antrix Corporation (ISRO) and MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd. (2004)
8. Technical Services Agreement concerning Hyderabad International Airport between Hyderabad International Airport Ltd and Malaysia Airport Holdings Bhd (2004)

B.2.3. India - Indonesia

India dan Indonesia telah menyepakati untuk membangun kemitraan strategis (*strategic partnership*) pada tahun 2005 yang didasarkan pada kesamaan nilai dan komitmen atas demokrasi. Kerjasama yang tercakup dalam kemitraan strategis India-Indonesia ditujukan untuk mengembangkan hubungan bilateral kedua negara pada bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Tiga MoU yang ditandatangani di dalam kerangka kesepakatan tersebut adalah masing-masing MoU dalam bidang maritim dan perikanan, pembentukan *Joint Study Group* untuk mengkaji pembentukan CECA antara India dan Indonesia, serta kerjasama dalam melakukan pelatihan diplomat.¹¹⁷

¹¹⁷ "RI-India Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Budaya", Sinar Harapan, *Senin, 18 Juni 2007*.

Hubungan kemitraan antara India dan Indonesia telah berlangsung sejak kurun waktu yang lama. Kondisi geografis dimana kedua negara bertetangga secara maritim menjadi dasar bagi kedua negara untuk mengembangkan kerjasama pertahanan dalam bidang maritim. Pada periode pasca-Perang Dingin, angkatan laut India dan Indonesia kerap melakukan pelatihan bersama dan tukar menukar informasi untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi kedua negara.¹¹⁸

Berikut adalah perjanjian yang ditanda-tangani kedua negara dalam kerangka Look East Policy:

1. Agreement on Promotion and Protection of Investment(1999)
2. MoU on Cooperation in the field of Tourism(2000)
3. MoU for establishing Joint Commission(2001)
4. MoU for cooperation in the field of Science and Technology
5. Work Plan for cooperation in the field of Agriculture(Extension to 2007 recommended by JCM) (2001)
6. MoU on Defence Cooperation(2001)
7. Agreement on Visa exemption for Diplomatic and Official passport holders(2002)
8. MoU between National Institute of Aeronautics of Space of Indonesia(LAPAN) and ISRO on Cooperation in the field of outer Space Research and Development(2002)
9. MoU on setting up of Vocational Training Centre for Construction Sector(2002)
10. MoU on Cooperation to Combat International Terrorism(2004)
11. MoUs on Marine and Fisheries Cooperation(2005)
12. MoU on Establishment of a Joint Study Group to examine the feasibility of a Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). (2005)
13. MoU on Cooperation in Education and Training between the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and Indian Ministry of External Affairs. (2005)

¹¹⁸ "India Ikut Amankan Selat Malaka", *Kompas*, 1 Juli 2004.

B.2.4. India - Myanmar

Myanmar adalah satu-satunya negara yang berbatasan secara maritim maupun daratan dengan India. Kondisi demikian menempatkan Myanmar sebagai negara Asia Tenggara yang mendapatkan tempat khusus dalam pelaksanaan politik luar negeri dan kebijakan keamanan India. Secara umum hubungan bilateral kedua negara dapat dikatakan berada dalam level kerjasama yang tinggi, terutama setelah Jenderal Senior Than Swe, pimpinan SPDC (*State Peace and Development Council*) berkunjung ke India pada tahun 2004.

India dan Myanmar juga telah mengembangkan hubungan kerjasama yang bersifat umum maupun spesifik, misalnya dalam penandatanganan MoU Tripartit diantara India, Myanmar, dan Thailand berkenaan dengan penjagaan keamanan maritim, MoU India dan Myanmar mengenai aktivitas perdagangan di wilayah perbatasan, dan MoU India-Myanmar perihal otoritas masing-masing negara dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan.¹¹⁹

Marie Lall (2006) mengatakan ada dua isu vital yang harus di perhatikan oleh India jika ingin mempertahankan pertumbuhan dan pembangunannya, yang pertama adalah India membutuhkan situasi regional yang damai dan India membutuhkan suplai energy yang konstan dan dapat diandalkan.

Hubungan kedua negara juga terbangun sangat erat dalam sektor energi. Banyak perusahaan India, baik swasta maupun BUMN, yang terlibat dalam eksplorasi minyak dan gas alam di Myanmar. Bahkan, kedua negara pun tengah mengkaji kemungkinan bagi pembangunan jalur transportasi energi antara India-Myanmar. Selain dalam sektor energi, perusahaan-perusahaan konstruksi asal India juga banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Myanmar.

¹¹⁹ Zhao Gancheng, "India: Look East Policy and Role in Asian Security Architecture", *op, cit.*

B.2.5. India - Singapura

Hubungan India dengan Singapura terutama terjalin dalam kerjasama ekonomi bilateral. Pada bulan Juni tahun 2005, India dan Singapura menyetujui pelaksanaan CECA yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti promosi dan investasi bilateral, peningkatan volume perdagangan, dan pengurangan tarif biaya masuk atas komoditi-komoditi tertentu sebagai prasyarat bagi rencana pelaksanaan FTA bilateral diantara kedua negara.

Singapura juga menjalin hubungan kerjasama dalam pengadaan peralatan dan teknologi militer dengan India. Singapura juga berperan penting dalam proses bergabungnya India ke dalam ARF pada tahun 1996. Kedua negara juga memiliki cakupan kerjasama dalam bidang pengembangan perangkat lunak (*software*) sebagai bagian dari kerjasama teknologi informasi yang dikembangkan oleh India dan Singapura.

Sebuah *task force* juga telah dibentuk untuk memfasilitasi kerjasama dalam bidang teknologi informasi. India dan Singapura juga melakukan pengenalan bersama (Mutual Recognition) dari *DoE Accredited Courses* dan Singapore Computer Society. India dan Singapura juga membentuk proyek bersama dalam bidang *e-commerce* yang diperkuat dengan diskusi tentang *e-commerce* dan *Digital Exchange*. Singapura juga membantu India untuk menjadi PKI (Public Key Infrastructure). Perusahaan Singapura, Singapore Telecommunications Ltd., dan Perusahaan India, Bharti Enterprises, mengadakan Joint Venture yang bernilai 650 Juta US \$ untuk membangun perusahaan jaringan kabel dalam bentuk kapasitas terbesar di dunia.

Berikut adalah daftar *Agreement* antara India dengan Singapura sejak berada dalam kerangka Look East Policy:

1. Executive Programme on Cooperation in the Arts, Heritage, Archives and the Library (2000)
2. Memorandum of Understanding on Telecommunications (2002)
3. Defence Cooperation Agreement (2003)
4. Memorandum of Understanding Concerning a Third Country Training Programme (2003)

5. Comprehensive Economic Cooperation Agreement (2005)
 - Free Trade Agreement, in goods and services, and investment;
 - A bilateral agreement on investment promotion, protection, and cooperation;
 - An improved Double Taxation Avoidance Agreement;
 - A more liberal Air Services Agreement, and Open Skies for Charter Flights; and
 - A work programme of cooperation in a number of areas including health care, education,
 - Media, tourism, and the creation of an India-Singapore Fund, with a target of US\$1 billion.
6. Prevention of fiscal evasion (2005)
7. Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2005)
8. Memorandum of Understanding for Army-to-Army Exercises (2005)

B.2.6. India - Kamboja

India memiliki hubungan penting dengan Kamboja sejak India mengakui rezim *Hang Samrin* pada tahun 1981. Meskipun tidak banyak perjanjian yang bisa dihasilkan dalam kerangka Look East Policy, India memiliki perjanjian kerjasama bilateral dengan Kamboja dalam kerangka Look East Policy, yaitu:

1. Bilateral Market Access Agreement (2003)
2. Cooperation in the fields of trade (2003)
3. Science & technology (2003)
4. Agriculture, tourism(2004)
5. Air services and visa exemption(2004)

India juga memiliki beberapa *project* di bidang pendidikan, *entrepreneurship development*, dan teknologi Informasi. India juga membantu kamboja dalam kerangka ITEC.

Selama tahun 2003-2004, penguatan hubungan antar kedua negara ditandai dengan kunjungan kunjungan bilateral resmi. Menteri Hubungan Luar negeri India, Shri Yashwant Sinha, mengunjungi Kamboja pada 17-20 Juni

2003 untuk mengikuti dalam pertemuan ARF - ASEAN Regional Forum. India juga mengikuti pertemuan Post Ministerial Consultations (PMC) dan pertemuan Mekong Ganga Co-operation (MGC) yang ketiga. Pada pertemuan regional, Shri Yashwant Sinha menyerahkan bantuan tinta yang sulit dihilangkan untuk digunakan dalam pemilu Kamboja pada Juli 2003 kepada Sar Kheng, Deputy Prime Minister dan Co-Interior Minister Kamboja. Pada 21 Juli 2003, India dan Kamboja menandatangani '*Bilateral Market Access Agreement*' di Jenewa, sebagai persyaratan untuk keanggotaan Kamboja di WTO.

B.2.7. India - Laos

Perjalanan bersejarah hubungan bilateral antara kedua Negara (Laos dan India) dimulai dengan kunjungan PM India ke Laos pada november 2002 dan Kunjungan balasan PM Laos pada Juni 2003. Hubungan bilateral kedua negara menjadi signifikan ketika Laos menjadi *Country Coordinator* bagi India di ASEAN pada 2003. Hubungan Ini diperkuat oleh pertemuan India dan ASEAN dalam India-ASEAN Summit di Vientiane, Laos, pada 29-30 November 2004. Pertemuan ini juga bertepatan dengan peringatan ASEAN Summit ke 10, ASEAN Business and Investment Summit dan Pengadaan India-ASEAN Car Rally Untuk yang pertama kali. Pada kesempatan itu, PM India bertemu dengan Presiden Laos Khamtay Siphandone pada 29 November 2004 yang didahului oleh diluncurkannya Laos-India Entrepreneurship Development Centre.

Berikut adalah perjanjian yang ditanda-tangani kedua negara dalam kerangka Look East Policy:

1. Agreement on trade and investment
 - Agreement for setting up of Joint Commission on trade, economic and scientific cooperation (Mei 1997)
 - Two important Agreements - one on Trade and Economic Cooperation (Mei 1997)
 - Bilateral Investment Promotion & Protection (November 2000)
2. Agreement on Cooperation in Defence (November 2002)

3. Agreement on Cooperation in Science & Technology (Juni 2003)
4. As part of Agricultural Cooperation,
 - Work Plan for 2001-02, dovetailing specific areas for intensified interaction
 - extended Work Plan for 2001-02 to 2004.
5. An MoU for setting up of Lao-India Entrepreneurship Development Centre (LIEDC) was signed between EAM and Lao Deputy Prime Minister and Foreign Minister (Juli 2004). (LIEDC was formally inaugurated by EAM and Lao Education Minister (November 2004))
6. An MoU for setting up of an Information Technology Centre (September 2004). (The IT Centre formally inaugurated by EAM and Minister in the Lao Prime Minister's Office and President of STEA (November 2004))
7. Agreement for Mutual Cooperation on Drug Demand Reduction and Prevention of Illicit Trafficking and related matters came into force (Februari 2005).
8. Agreement on Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Official Passports (April 2005).

B.2.8. India - Vietnam

Hubungan India dengan ketiga negara ASEAN ini telah berlangsung dalam intensitas yang cukup tinggi semenjak era Perang Dingin. Dengan Kamboja, India telah menjalin hubungan dekat sejak era kepemimpinan Heng Shamrin di negara tersebut pada dekade awal tahun 1980-an. Kedua negara banyak memiliki perjanjian bilateral dalam berbagai sektor kerjasama seperti perdagangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, pariwisata, jasa penerbangan, dan lain-lain. India juga mengembangkan program pelatihan, khususnya dalam pelatihan kewiraswastaan dan teknologi informasi dibawah kerangka program *Indian Technical and Economic Cooperation* (ITEC). ITEC adalah merupakan program bantuan ekonomi dan pelatihan sumber daya manusia yang telah berlangsung semenjak tahun 1981.

India dengan Laos telah mengembangkan kerjasama dalam berbagai sektor seperti dalam sektor pertanian, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanggulangan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, dan pelatihan diplomat. India juga membangun pusat pelatihan kewiraswastaan (*Entrepreneurship Development Centre*) dan tengah mengembangkan potensi untuk membangun pula pusat pelatihan teknologi informasi di negara tersebut.

Vietnam adalah salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki banyak perjanjian kerjasama bilateral dengan India. Sejak tahun 1976, India telah banyak memberikan bantuan ekonomi kepada Vietnam melalui Kementerian Keuangan India dan *Exim Bank of India*. Tercatat sebanyak 14 kali India memberikan bantuan ekonomi kepada Vietnam dalam periode waktu 1974-2004.¹²⁰ Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat bahwa kedekatan diantara kedua negara telah terbangun sejak era Perang Dingin sebagai sesama negara yang memiliki kedekatan dengan Uni Soviet. Sebagai realisasi kerjasamanya di bidang pendidikan dan teknologi informasi, India juga telah membantu Vietnam untuk mengembangkan pusat pelatihan teknologi informasi di Hanoi dan memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada kurang lebih enam institusi pendidikan tinggi dalam bidang teknologi informasi di Vietnam.¹²¹

Berikut adalah perjanjian yang ditanda-tangani kedua negara dalam kerangka Look East Policy:

1. Joint Declaration on the framework of comprehensive cooperation (2000)
2. Joint Declaration to officially establish strategic partnership (1997)
3. MOU for setting up a hot rolling steel mill (2005)
4. A Joint Committee on Science & Technology (1997) yang diawali oleh Agreement on bilateral cooperation in Science & Technology (1976) dan diperbaharui pada 1996.

¹²⁰ Subhash Kapila, "India-Vietnam Strategic Partnership: The Convergence of Interests", South Asia Analysis Group Paper no.177, <http://www.saag.org/papers2/paper177.htm>, (Diakses pada tanggal 17 November 2007 pukul 16.20 WIB).

¹²¹ *ibid.*

5. India-Vietnam Protocol on Information Technology (1999)
6. Trade Agreement (2000)
7. Bilateral Investment Promotion and Protection
8. Avoidance of Double Taxation Agreement
9. Consular Agreement
10. Culture Agreement
11. Tourism Agreement
12. Air Service Agreement
13. Agreement on Cooperation in Science & Technology
14. An agreement on cooperation between Doordarshan and Vietnam Television (2001)
15. Agreement on reciprocal exchange of plots of land for the embassies (2001)

B.2.9. India - Brunei

Sampai saat ini, belum banyak catatan sejarah yang bisa dimunculkan mengenai hubungan bilateral antara India dengan Brunnei Darussalam. Namun, setelah beberapa tahun terakhir tercatat beberapa bentuk perjanjian kerjasama antara India dengan Brunei, berikut adalah bentuknya:

1. *Air Services Agreement*¹²²
2. Agreement on Cooperation for the Establishment of Telemetry, Tracking and Telecommand Station for Satellites and Launch Vehicles and for Cooperation in the Field of Space Research, Science and Applications (1997). Dibawah perjanjian ini, Indian Space Research Organisation membangun stasiun Telemetry Tracking and Command (TTC) di Brunei pada 1999.

¹²² Di bawah perjanjian ini, Royal Air Brunei (RBA) pernah beroperasi dengan penerbangan langsung dari Bandar Seri Begawan ke kalkuta melalui Singapura. Namun, RBA menghentikan operasi pada rute tersebut sejak 31 Oktober 2004 sehubungan dengan pertimbangan ekonomis dan sampai saat ini belum ada pembukaan penerbangan langsung lagi.

3. *Cooperation in other fields such as Railways, Space, IT, Biotechnology, Infrastructure, Mining, etc.*
4. Dua perusahaan informasi dan teknologi India, I-Flex and Lifetree Convergence Ltd. menandatangani perjanjian kerjasama untuk mensuplai *software* dan Jasa yang terkait kepada perusahaan perusahaan Brunei. 2003

B.2.10. India - Filipina

Penjabaran mengenai hubungan bilateral antara India dengan Filipina diawali dari perspektif sejarah. Setelah kemerdekaan Filipina di 1946 dan India pada 1947, kedua negara ini langsung membentuk hubungan diplomatis pada tahun 1949. Hubungan kedua negara ini di dasari oleh nilai yang sama yakni berdasarkan atas nilai anti kolonialisme. Hubungan kedua negara kemudian diperkuat ketika keduanya bertemu dalam pertemuan bilateral dalam ASEAN-India Business Summit di Vientiane pada bulan November 2004. Dalam pertemuan tersebut, peningkatan hubungan terjadi pada sektor politik dan ekonomi. Dalam sektor pertahanan, Filipina mendapatkan kunjungan dari 5 kapal angkatan laut India pada 29 Oktober-1 November 2004.

Berikut adalah perjanjian yang ditanda-tangani kedua negara dalam kerangka Look East Policy:

1. MOU on Scientific and Technological Cooperation with Focus on Pharmaceuticals (March 1997)
2. MOU between the National Small Scale Industries Corporation Ltd. and the Bureau of Small and Medium Business Development (March 1997)
3. MOU on holding of Annual Policy Level Foreign Office Consultations (2000)
4. Agreement for Promotion and Protection of Investments (2000)
5. MOU between Jawaharlal Nehru University and University of Philippines (2003)
6. MOU between the Gas Authority of India Limited (GAIL) and the Philippine National Oil Company (PNOC) (Sept. 2003)
7. MOU between GAIL and the Department of Energy (2003)
8. MOU between Pharmexcil and the Philippine International Trading Cooperation (November 2004)

9. Extradition Treaty (March 2004)
10. Agreement on Defence Cooperation (February 2006)
11. Agreement on Cooperation in the Field of Tourism (February 2006)
12. MOU on Cooperation in the Field of Agriculture and Related Fields (February 2006).

